

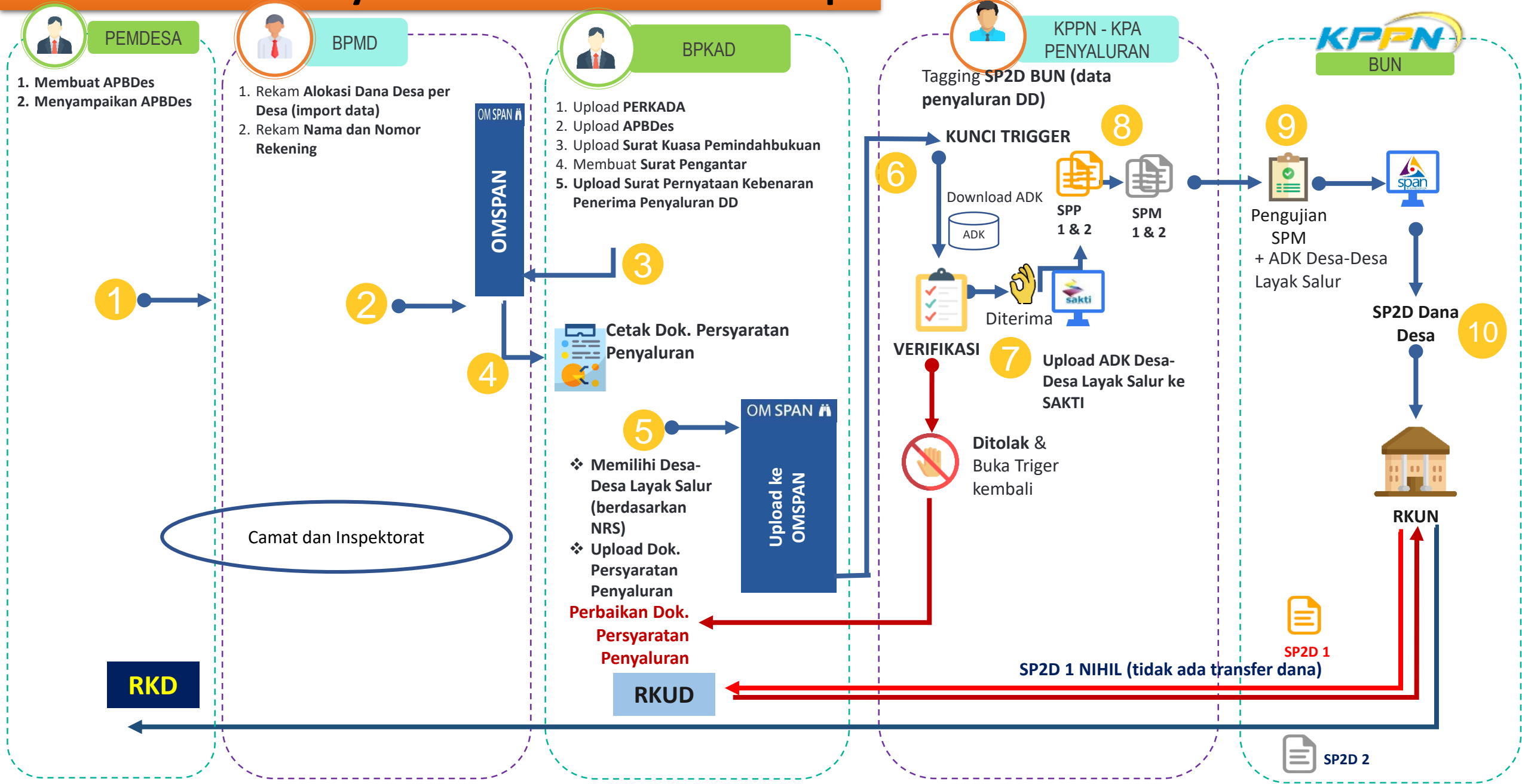


KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# **EVALUASI PENYALURAN DANA DESA TA 2020**

Sosialisasi Kebijakan Dana Desa Untuk BLT Desa  
Jakarta, 23 April 2020

# Proses Bisnis Penyaluran Dana Desa Tahap I



Σ BATCH	Σ DESA	PEMDA			Jumlah	Verifikasi	KPPN		Nilai SP2D
		Upload Dok	Kirim Dok	Jumlah			Penerbitan SP2D	Jumlah	
805	20.434	2,5 HK	1,8 HK	4,3 HK	1,7	4,5 HK	6,2 HK	8,03 T	

April 2020

Σ BATCH	Σ DESA	PEMDA			Jumlah	Verifikasi	KPPN		Nilai SP2D
		Upload Dok	Kirim Dok	Jumlah			Penerbitan SP2D	Jumlah	
646	17.556	2.05 HK	1,6 HK	3,69	1,6 HK	2,6 HK	4,2 HK	6,86 T	

- Proses upload s.d kirim dokumen persyaratan oleh Pemda rata-rata 3,7 sampai dengan 4,3 hari kerja ( 1 s. d 29 hari kerja). Hanya 23 batch upload dokumen pada 1 hari kerja.
- Proses upload dokumen persyaratan tidak selalu dilakukan pada hari yang sama.
  - 548 batch upload dokumen 2 hari kerja
  - 627 batch upload dokumen antara 3 s.d. 5 hari kerja
  - 175 batch upload dokumen 6 s.d. 10 hari kerja
  - 65 batch upload dokumen 11 s.d. 20 hari kerja
  - 13 batch uplod dokumen 21 s.d. 29 hari kerja
- Kecepatan penyaluran di KPPN mengalami kenaikan dari rata-rata 6,2 Hari Kerja pada periode Januari s.d. Maret 2020 menjadi 4,2 HK sejak bulan April 2020

# Penyaluran Dana Desa 2019-2020 Tahap I (Akumulasi) Year to Year 22 April

**Nasional 2020** Pagu Thp I: Rp29,14 T  
 Realisasi : Rp16,83 T **57,74%**

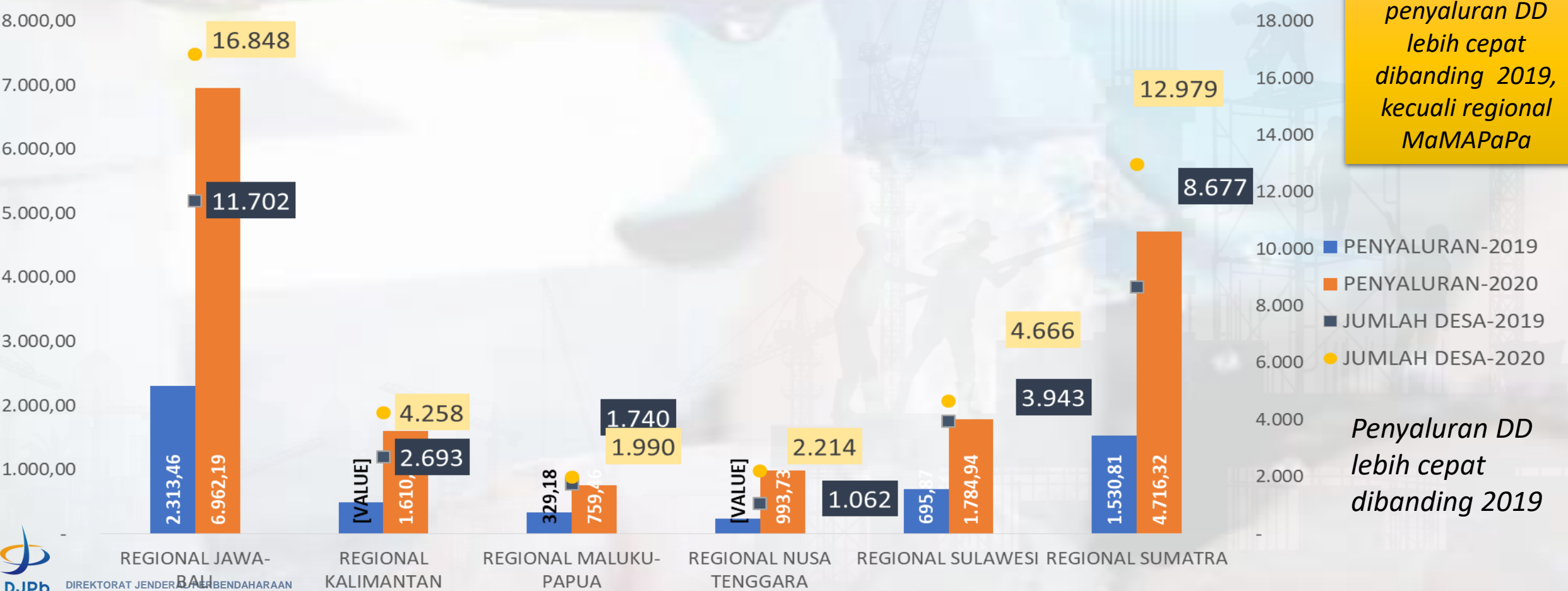
**Nasional 2019** Pagu Thp I: Rp14,00 T  
 Realisasi : Rp5,60 T **40%**

**Nasional 2020** Desa: 74.954  
 Salur: 42.955 **57,31%**

**Nasional 2019** Desa: 74.953  
 Salur: 29.817 **39,78%**

*Semua regional penyaluran DD lebih cepat dibanding 2019, kecuali regional MaMAPaPa*

*Penyaluran DD lebih cepat dibanding 2019*



# PROGRES PENYALURAN DANA DESA TAHAP I PER 22 APRIL 2020 PER PROVINSI

No	Provinsi	Jumlah Desa	Pagu Tahap I	Jumlah Penyaluran (SP2D)			
				Desa		Nominal	
				JML	%	JML	%
1	DI YOGYAKARTA	392	198.374.520.600	392	100,0%	198.374.520.600	100,0%
2	BALI	636	313.762.675.200	636	100,0%	313.762.675.200	100,0%
3	KEPULAUAN BANGKA BELIT	309	150.942.862.000	309	100,0%	150.942.862.000	100,0%
4	KALIMANTAN SELATAN	1.864	613.232.909.600	1.814	97,3%	595.856.861.200	97,2%
5	KEPULAUAN RIAU	275	133.079.757.600	254	92,4%	124.705.865.600	93,7%
6	SUMATERA BARAT	928	384.454.160.800	823	88,7%	341.482.992.000	88,8%
7	JAWA TENGAH	7.809	3.280.243.440.000	6.711	85,9%	2.811.413.128.400	85,7%
8	GORONTALO	657	257.607.044.000	521	79,3%	207.488.543.600	80,5%
9	JAWA TIMUR	7.724	3.061.693.936.000	6.115	79,2%	2.387.743.707.410	78,0%
10	MALUKU UTARA	1.063	394.138.405.000	817	76,9%	306.627.388.200	77,8%
11	LAMPUNG	2.435	981.621.326.000	1.850	76,0%	743.932.326.400	75,8%
12	NUSA TENGGARA BARAT	995	493.341.648.400	726	73,0%	377.236.801.600	76,5%
13	ACEH	6.497	2.055.774.613.400	4.474	68,9%	1.436.941.985.111	69,9%
14	KALIMANTAN UTARA	447	226.811.488.000	298	66,7%	147.454.603.600	65,0%
15	SULAWESI UTARA	1.507	510.485.757.000	915	60,7%	311.557.159.600	61,0%

No	Provinsi	Jumlah Desa	Pagu Tahap I	Jumlah Penyaluran (SP2D)			
				Desa		Nominal	
				JML	%	JML	%
16	SUMATERA SELATAN	2.853	1.085.111.618.800	1.625	57,0%	618.025.979.600	57,0%
17	RIAU	1.591	588.149.632.000	868	54,6%	333.274.731.200	56,7%
18	KALIMANTAN TENGAH	1.433	561.228.750.800	765	53,4%	305.079.858.800	54,4%
19	KALIMANTAN BARAT	2.031	817.052.854.000	1.077	53,0%	447.097.510.000	54,7%
20	SULAWESI TENGAH	1.842	644.081.885.600	955	51,8%	335.270.706.800	52,1%
21	SULAWESI TENGGARA	1.911	661.570.274.400	985	51,5%	349.574.600.696	52,8%
22	BANTEN	1.238	449.125.319.200	631	51,0%	212.075.234.800	47,2%
23	SULAWESI SELATAN	2.255	981.075.587.200	1.141	50,6%	521.230.130.400	53,1%
24	BENGKULU	1.341	439.805.138.800	666	49,7%	214.271.606.800	48,7%
25	NUSA TENGGARA TIMUR	3.026	1.266.278.914.200	1.488	49,2%	616.497.724.960	48,7%
26	JAWA BARAT	5.312	2.393.958.473.800	2.363	44,5%	1.038.824.850.400	43,4%
27	KALIMANTAN TIMUR	841	363.590.471.600	304	36,1%	115.479.954.800	31,8%
28	JAMBI	1.399	536.041.204.400	495	35,4%	227.216.368.000	42,4%
29	SUMATERA UTARA	5.417	1.821.651.231.600	1.615	29,8%	525.520.759.200	28,8%
30	PAPUA BARAT	1.742	624.324.202.800	508	29,2%	193.023.925.200	30,9%
31	SULAWESI BARAT	575	229.980.834.400	149	25,9%	59.822.990.400	26,0%
32	MALUKU	1.198	463.754.238.400	159	13,3%	65.260.993.600	14,1%
33	PAPUA	5.411	2.163.546.140.800	506	9,4%	194.545.010.000	9,0%

a. 3 Provinsi sudah salur 100%

b. 12 Provinsi salur 60% s.d. 97%

c. 13 Prov sudah salur 40 s.d. 59%

d. 5 Provinsi salur < 40%

## PROGRES PENYALURAN DANA DESA TAHAP II PER 22 APRIL 2020 PER PROVINSI

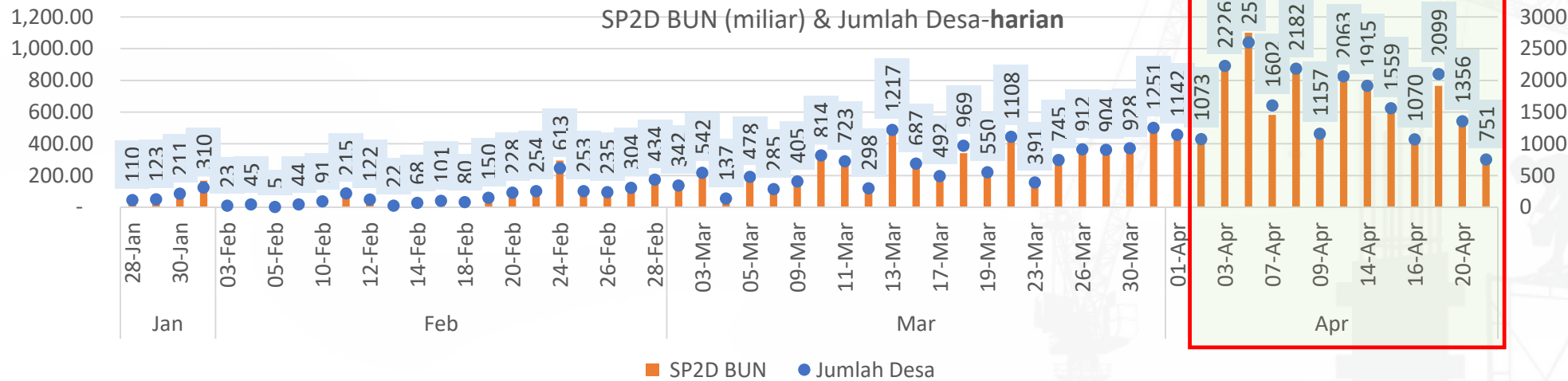
No	Provinsi	Jumlah Desa	Pagu Tahap II	Jumlah Penyaluran (SP2D)			
				Desa		Nominal	
				JML	%	JML	%
1	KALIMANTAN SELATAN	1.864	613.232.909.600	122	6,5%	38.676.034.000	6,3%
2	JAWA TIMUR	7.724	3.061.693.936.000	222	2,9%	73.876.270.000	2,4%
3	BALI	636	313.762.675.200	10	1,6%	4.951.047.200	1,6%
4	ACEH	6.497	2.055.774.613.400	6	0,1%	1.877.966.000	0,1%
5	JAWA TENGAH	7.809	3.280.243.440.000	2	0,0%	679.062.800	0,0%

- Sebanyak 362 Desa pada 5 Provinsi sudah mengajukan Dana Desa Tahap II
- Dalam pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II, Pemda agar memperhatikan sisa Dana Desa tahun 2019
- Sisa Dana Desa 2019 yang tidak dianggarkan pada TA 2020, akan diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II

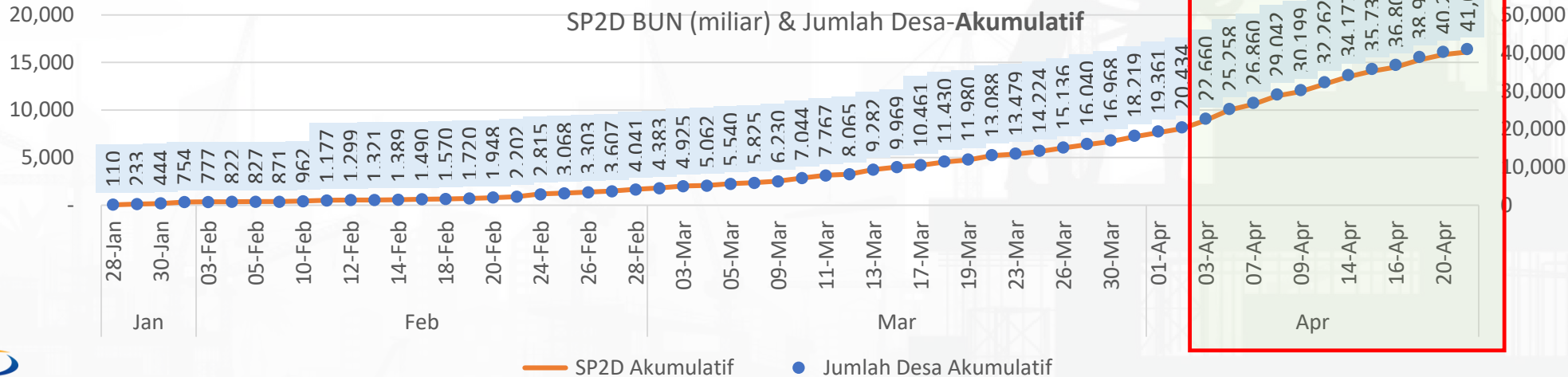
# Penyaluran Dana Desa 2020 - NASIONAL

Update Data per 21 April 2020 Pukul 15.00

REGIONAL	Jumlah Desa	Pagu DIPA	Pagu Tahap I	REALISASI S.D. 21042020 15.00			
				DESA	% DESA	NOMINAL	% NOMINAL
NASIONAL	74.954	72.000.000.000.000	29.145.891.316.400	41.012	54,72%	16.093.766.720.963	55,22%



Terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap penyaluran DD setelah **relaksasi RPD** sesuai ND Dir PKN No 464/PB.3/2020 tgl 2 April 2020



Perbaiki proses bisnis aplikasi OMSPAN, pengajuan batch berikutnya oleh Pemda bisa dilakukan **tanpa menunggu batch sebelumnya selesai** proses di KPPN

# IDENTIFIKASI FAKTOR KENDALA

1. Kelembagaan
  - a. Kebijakan internal di beberapa Pemda bahwa penyaluran Dana Desa harus dilakukan bersamaan seluruh desa.
  - b. Kepala/wakil kepala daerah yang berhalangan tetap/sementara.
  - c. Kapasitas SDM, baik di Desa maupun di Pemda.
2. Administrasi Syarat Penyaluran
  - a. APBDes belum ditetapkan antara lain karena Kepala Desa masih baru.
  - b. Pemahaman dari Pemda bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan setelah perubahan Perkada dan APBDes. KPPN akan salur tanpa menunggu perubahan Perkada dan APBDesa.
  - c. Kesalahan rekening Desa yang berakibat penolakan SPM atau Retur.
  - d. Perubahan nama desa akibat pemekaran wilayah.
3. Peran Pendamping Desa belum optimal.
4. Belum pahamnya beberapa pihak mengenai proses bisnis penyaluran Dana Desa berdasarkan SOP.
5. SOP yang masih belum mencantumkan ketentuan waktu .
6. Interkoneksi Siskeudes dan OMSPAN.
7. Kendala akses jaringan pada beberapa daerah yang berdampak pada akses ke OMSPAN
8. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi/kebijakan.



# UPAYA/KEBIJAKAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYALURAN

1. Sosialisasi dan edukasi mengenai penyaluran Dana Desa
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan
- 3. Dispensasi/Relaksasi penyaluran Dana Desa melalui dispensasi Rencana Penarikan Dana (RPD).**
4. Penyempurnaan aplikasi OMSPAN, Pemda dapat mengajukan *batch* penyaluran secara simultan.
5. Upaya percepatan penyaluran yang dilakukan DJPb, tidak meninggalkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan *good governance*, antara lain verifikasi dokumen yang diatur dalam PMK-205/PMK.07/2019 dan PMK-40/PMK.07/2020.

*“Percepatan penyaluran Dana Desa membutuhkan komitmen, kerja keras, dan sinergi dari semua Unit terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing”*

The background of the slide is a light gray silhouette of a construction site. It features several cranes of different sizes, some with long jibs extending across the frame. In the foreground and middle ground, there are silhouettes of construction workers. Some are standing on scaffolding or rebar structures, while others appear to be working on the ground level. The overall scene is a busy construction site, rendered in a minimalist, high-contrast style.

# TERIMA KASIH